

DAFTAR ISI

2014

PANGGUNG TERAKHIR SBY	8
Memilih Presiden Pelayan Rakyat	12
Kasus SKK Migas dan Kenyamanan Istana	14
Agresivitas Pemberantasan Korupsi dan Klaim SBY	17
Tiga Blunder Para Oportunis	20
Corby adalah Pesan kepada ASD	24
Eksperimen Perppu melawan Konstitusi	27
Waspada! Gerakan Mengubur Century	30
Kerja Kotor Penguasa	33
Dua RUU Tak Layak Dibahas	35
Siluman Century dan Medali untuk KPK	38
Perumus Kebijakan Bukan Malaikat	42
Anas dan Kejahatan Pemilu 2009	46
Bijak Mencoblos agar Tak Terjeblos	48
Memaknai Tuntutan Perubahan	50
Jangan Lagi Salah Memilih Presiden	53
Ketika Sengkuni Menjadi Brutus	57
Menakar Beban Pemerintah Baru	60
Kejahatan di Tahun Politik	63
UU Pemilu dan Rusaknya Demokrasi	66
KPK Tidak Lagi Perang-Perangan	70
Sinkronisasi Pusat-Daerah	73
Calon Nakhoda Baru dan Arah Indonesia	76
Pembenahan Tata Kelola Haji	79
Memerangi Praktik Kartel	81
Penyelundupan BBM Mestinya Kategori Tipikor	85
Perburuan Aset Bank Century	88

Pemimpin Baru di Bulan Ramadan	89
Praktik Kartel Sudah Terkonfirmasi	92
Amicus Curiae, Manuver Penyelamatan Boediono	95
Pesan Kepastian untuk Rakyat dan Dunia	98
Koreksi Subsidi	101
Urgensi Perluasan Jelajah KPK	104
Sinergi Pemerintah Baru-KPK	106
Hak Prerogatif dan Beda Pandang Jokowi-JK	109
Politik Subsidi dan Revolusi Mental	112
Penumpang Gelap Jokowi-JK	115
Ekses BBM di Penghujung 2014	118
Rusak Akibat Pilkada Langsung	122
Mempersoalkan Konsistensi Jokowi	125
Bunuh Diri Politik	128
Perilaku Kepemimpinan SBY di Bawah Standar Negarawan	131
Mewujudkan Kesetaraan Eksekutif-Legislatif	134
Selamat Bekerja, Bapak Presiden	137
Posisi Indonesia Dalam 'Perlawanan' Asia	140
Penguatan Peran Oposisi	143
KIH Gagal Tanggapi Perubahan	146
Kartu Sakti Jokowi dan Niat Baik KMP	148
Pertaruhan Kredibilitas Jokowi	152
Interpelasi Pil Pahit Jokowi	155
Beringin Tidak Akan Tumbang	158
Century dan Memori Publik	161
Beda Munas Aspiratif dan Forum Pembangkang	164
Gerogoti KMP, Pemerintah Tunggangi Kisruh Golkar	168
2015	
HARMONI SEMU EKSEKUTIF-LEGISLATIF	171
PK dan Ancaman Narkona-Korupsi	175
Efek Jera dan Darurat Narkoba	178
Konsolidasi Pemerintah versus Intervensi	181
Apa Agenda Jokowi-PDIP untuk KPK?	185
100 Hari Jokowi; Ketika Hak Prerogatif itu Dibagi-bagi dan	

Dirampas	188
Bapak Presiden, Tolong Pulihkan Martabat Polri dan KPK	191
Presiden Jangan Bohongi Publik	194
Istana Rajawali atau Istana Kampret?	198
Potret Birokrasi, dari Anggaran Siluman sampai Kartel Beras	201
DKI, Etika dan Prioritas	204
Eksperimen Pembegal Demokrasi	208
Mengulang Skenario Mega vs Soeryadi pada ARB vs AL	211
Hak Angket untuk Kemurnian Demokrasi	214
Dua Kali Menkumham Permalukan Presiden	217
Kalau Presiden Petugas Partai, Loyalitasnya Ganda	220
Kemenkumham Gagal Bina Sipir LP	224
Menunggu Reshuffle Kabinet	227
Polri-KPK Bersepakat, Citra Pemerintah Tertolong	230
Jangan Rekayasa Potensi Konflik di Pilkada 2015	233
Ingin Menang Besar, KPU diintervensi	237
Konspirasi Memperlemah Golkar dan PPP	240
Jokowi Berjudi dengan Daya Tahan Rakyat	243
Kau yang Memulai, Kau yang Mengakhiri	246
Golkar dan ARB Berani Main Panjang	248
Machiavellian di Balik Konflik Golkar dan PPP	251
Genderang Perang Partai Golkar	255
Jangan Coba-Coba Langgar UU MD3	257
Human Error di Kabinet Kerja	261
WP Jujur versus 'Proyek' Tax Amnesty	264
Endapan Dana dan Akselerasi Pembangunan Daerah	267
Waspada Capim KPK Titipan	270
Menyoal Kualitas Pemimpin dari Pilkada yang Dipaksakan	273
Jangan Fokus ke Pilkada, Perbaiki Salah Urus Ekonomi	277
Kado Tak Sedap bagi HUT RI	280
Menyoal Soliditas Kabinet Pasca Reshuffle	283
Setelah Sindikat Narkotika dan Terorisme, Kini Cybercrime	286
Jangan Ambivalen dalam Memerangi Korupsi	290
Pelindo II Sarat Masalah, Pansus Harus Lintas Komisi	293
Manajemen Konflik dalam Kabinet Kerja	297

Counter Cyclical dan Depresiasi Rupiah	300
Mewaspada Eskalasi Tekanan Ekonomi	303
KPK dan Bahaya sebuah Superbody	306
Nawa Cita dan Setahun Tanpa Arah	310
Golkar Sudah Lalui Ujian Terberat	313
Negara Berselimut Bencana, RAPBN 2016 Tidak Responsif	316
Persepsi Masih Negatif, Tantangan Makin Berat	320
Dugaan Hanky-Panky di Petral	323
Setengah Abad Freeport di Papua Sudah Cukup	326
Skenario Jebakan Maut untuk Presiden	330
Korupsi Makin Marak, Segera Perkuat KPK	333
Hilangnya Kehormatan MKD	336
Bapak Presiden, Kabinet Belum Bersih	339
Tahun Konsolidasi Sarat Gaduh	342

2016

GOLKAR DAN KETIDAKBIJAKSANAAN PEMERINTAH	346
Golkar tidak akan Punah	349
Eskalasi Kekuatan Serang Pelaku Teror	352
Teroris dan Bandar Narkoba Membidik Polisi	355
Negara Tidak Boleh Menoleransi Ancaman	358
Presiden dalam Kasus Abraham, Bambang dan Novel	361
KPK Harus Terbebas dari Potensi Rongrongan Eksternal-Internal	364
Negara Wajib Menghalau Rasa Takut Rakyat	367
SOP Penanganan Perkara dan Urgensi Mengawasi MA	370
Dewi Keadilan Dipermalukan	373
Urgensi Penguatan BNN dan Pengalaman Buruk Meksiko	376
Efektivitas Pengawasan untuk Cegah Tipikor	380
LP Narkoba Gagal Fungsi	383
Tantangan Baru: Terorisme di Perairan ASEAN	386
Setelah Belasan Tahun Memerangi Korupsi	389
Penegakan Hukum yang Penuh Noda	392
Utang yang Belum Lunas, BLBI dan Century	395
Tax Amnesty dan Potensi Pembangkangan WP	399
Catatan Menuju Munaslub Momentum Krusial Golkar	402

18 Tahun Reformasi yang Meresahkan	405
Tegar Memerangi Kejahatan Narkoba	409
Darurat Penegakan Hukum dan Inisiatif Presiden	412
Koordinasi Polri -OJK Bisa Cegah Investasi Bodong	415
Prajurit Polri Dibidik Teroris, Pengedar hingga Begal	418
Kapolri dan Akselerasi Reformasi Hukum	412
Kasus BPK versus Pemprov DKI Harus Tuntas	425
Menyiksa Balita dengan Vaksin Palsu	428
Deradikalisasi versus Brutalitas Pelaku Teror	432
Predator Balita Dibalik Skandal Layanan Medis	435
Tantangan Tito: Akselerasi Reformasi dan Merespons Ancaman	438
Jangan Paksa TNI Tangani Pidana Terorisme	441
Birokrasi Harus Bersih dari Sel-sel Sindikat Narkoba	445
ISIS Targetkan Kerusakan Besar di ASEAN	448
Remisi Koruptor dengan Alasan Tak Masuk Akal	451
Tekanan Polri-KPK versus Wacana Remisi Koruptor	454
Setengah Abad Kerja Pembaruan Hukum Pidana	458
BG dan Urgensi Penguatan Intelijen Negara	461
Urgensi Penegakan Hukum di Perairan ASEAN	464
Rakyat Menunggu Penyelesaian Kasus Century-BLBI	468
Justice Collaborator, Remisi dan Korupsi Berjamaah	471
Biaya Sosial Korupsi versus Remisi	474
Revitalisasi Hukum dan Hancurnya Mutu Penegakan Hukum	478
Dari Opstib ke OPP; Menyoal Konsistensi	481
Saber Pungli dan Efek Jera	484
Pesan untuk Pejabat Negara dan Daerah	488
Interpol dan Hambatan Kerja Sama	491
Jangan Eskalasi Kompleksitas Masalah	494
Pulihkan Segera Kondusifitas dan Kepastian	497
Siaga TNI-Polri Merespon Petualang Politik	501
Cegah Makar Demi Kontinuitas Reformasi	504
Beberapa Indikator Ini Menguji Ketahanan Nasional	507
Tertib Hukum Merespons Ketidakpastian Global 2017	511
Jalan Buntu 15 Tahun Pemberantasan Korupsi	515